BAB II

KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi yang dikembangkan oleh (Heider, 1958) mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan sesuatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya, dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh kombinasi antara kekuatan internal dan eksternal. Hal tersebut dijelaskan bahwa proses atribusi seseorang terhadap perilaku dipengaruhi oleh tiga elemen penting yaitu kekhususan yang merujuk pada apakah perilaku tersebut bersifat luar biasa atau tidak, konsensus yang merujuk pada bagaimana reaksi orang lain dalam situasi serupa, dan konsistensi yang merujuk pada seberapa konsisten seseorang memberikan reaksi yang sama dari waktu ke waktu. Kekuatan internal yang dimaksud adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya kemampuan, pengetahuan atau usaha, sedangkan kekuatan eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar misalnya keberuntungan, kesempatan dan lingkungan. Pada dasarnya, teori ini menjelaskan bahwa ketika kita melihat bagaimana seseorang berperilaku, kita berusaha untuk mengetahui apakah itu disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal.

Dalam audit, teori atribusi biasa digunakan sebagai dasar penelitian tentang *fraud*, yaitu meneliti tentang apa yang mendasari seseorang melakukan tindak *fraud* (Michael & Dixon, 2019). Namun, teori ini juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana auditor mengidentifikasi penyebab kesuksesan atau kegagalan dalam mendeteksi *fraud*. Ketika auditor berhasil mendeteksi *fraud*, secara psikologis

mereka akan mengaitkannya dengan faktor internal seperti dan kompetensi yang memadai dan skeptisisme profesional yang tinggi. Sebaliknya, ketika gagal mendeteksi *fraud*, auditor mungkin mengaitkannya dengan faktor eksternal seperti kurangnya pemanfaatan pada teknologi informasi yang tersedia.

Dalam penelitian ini, teori atribusi dapat menjelaskan bagaimana auditor menginterpretasikan pengaruh kompetemsi, skeptisisme profesional, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Auditor yang memiliki atribusi internal yang kuat akan lebih menekankan pada peningkatan komptensi dan skeptisisme professional sebagai faktor utama keberhasilan deteksi *fraud*. Sementara itu, auditor dengan atribusi eksternal yang dominan akan lebih fokus pada bagaimana pengoptimalan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Pemahaman terhadap pola atribusi ini penting untuk mengembangkan strategi yang tepat dalam meningkatkan efektivitas deteksi *fraud* di lingkungan audit.

2.2 Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

2.2.1 Definisi *Fraud*

Kecurangan (*fraud*) yaitu tindakan terencana oleh individu untuk merugikan pihak lain melalui informasi palsu (Albrecht, 2012). Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan pihak lain secara langsung atau tidak, seperti memanipulasi laporan yang dibuat oleh pihak internal maupun eksternal organisasi. Karyono (2013) menyatakan bahwa *fraud* adalah tindakan penyimpangan yang bertentangan

dengan hukum, dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk menipu dan menyajikan informasi yang tidak benar kepada pihak lain, baik yang dari dalam atau luar organisasi.

Istilah umum "kecurangan" mencakup berbagai bentuk dan cara di mana seseorang secara tidak sadar mengambil secara paksa hak orang lain untuk memperoleh keuntungan sendiri, yang merugikan berbagai pihak dan melanggar hukum. Disebabkan fakta bahwa tipu daya, licik, dan tidak adil kepada orang lain juga merupakan perbuatan curang, sangat sulit untuk mendefinisikan kecurangan secara khusus dan menerapkannya secara umum. Kecurangan adalah suatu hal yang sangat sulit untuk dihentikan.

Segitiga kecurangan *(triangle fraud)* yang terdiri, peluang, insentif/tekanan, dan rasionalisasi merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Risiko manipulasi dapat dibuat oleh auditor untuk memahami bahwa terdapat tiga keadaan yang umum terjadi ketika kecurangan terjadi (Boynton et al., 2003). Insentif/tekanan menciptakan kondisi di mana manajemen atau karyawan merasa terdorong untuk melakukan *fraud*. Kesempatan melakukan kecurangan timbul dari lemahnya pengendalian internal, kemampuan manajemen untuk mengesampingkan aturan, atau pengendalian yang tidak efektif. Rasionalisasi adalah kemampuan pelaku *fraud* untuk membenarkan tindakan mereka. Beberapa orang memiliki nilai etika yang membuat mereka melakukan kecurangan dengan sengaja.

2.2.2 Jenis *Fraud*

Jenis *fraud* menurut POJK 12 Tahun 2024 (Otoritas Jasa Keuangan, 2024):

1) Kecurangan penyelewengan aset

Melibatkan penyelewengan aset, seperti kas dan aset lainnya. Tindakan ini dapat berupa pencurian uang, manipulasi tagihan, atau pemalsuan catatan keuangan.

2) Kecurangan laporan keuangan

Melibatkan penyajian informasi yang sengaja dimanipulasi, baik dilebihkan atau dikecilkan, dengan tujuan menipu pasar, menyembunyikan masalah keuangan, atau meningkatkan nilai perusahaan.

3) Korupsi

Kecurangan yang mencakup suap, pelanggaran kepentingan, pemerasan ekonomi, dan pemberian hadiah yang tidak absah.

2.2.3 Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

Tuanakotta (2010) menyatakan bahwa kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sangat tergantung pada keterampilan atau kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Untuk menjelaskan, dapat disimpulkan bahwa pendeteksian kecurangan adalah upaya auditor untuk lebih selektif memperhatikan sinyal-sinyal awal dan data yang relevan, serta tingkat kualitas data auditor sendiri ketika mereka melakukan tugas mereka. Untuk membantu auditor dalam mengidentifikasi kecurangan, penting bagi mereka untuk memahami definisi, jenis, dan karakteristik kecurangan tersebut, serta metode deteksinya. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan memperhatikan

tanda-tanda atau sinyal kecurangan, yang dikenal sebagai *red flags* yang dapat menunjukkan adanya kecurangan.

Red flags adalah kondisi yang mencolok atau berbeda dari keadaan yang biasa. Dengan kata lain, *red flags* berfungsi sebagai petunjuk atau sinyal adanya sesuatu yang tidak normal dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Meskipun munculnya *red flags* tidak selalu berarti bahwa kecurangan terjadi, biasanya tanda-tanda ini muncul dalam setiap kasus kecurangan, sehingga dapat berfungsi sebagai peringatan bahwa kecurangan mungkin terjadi. Pemahaman dan analisis yang mendalam mengenai *red flags* dapat membantu auditor dalam langkah selanjutnya untuk mengumpulkan bukti awal atau mendeteksi adanya kecurangan.

2.2.4 Indikator Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

Menurut (Valery G. Kumaat, 2011) indikator dalam mendeteksi *fraud* adalah sebagai berikut:

1) Kemampuan Mendeteksi Kecurangan

   Seorang auditor harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengenali adanya kecurangan. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang karakteristik kecurangan, metode atau cara yang digunakan untuk melakukan kecurangan, serta jenis-jenis kecurangan yang relevan dengan aktivitas yang sedang diperiksa.

2) Sikap Waspada yang Tinggi

   Auditor harus memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan, terutama jika terdapat kelemahan dalam pengendalian internal. Dalam situasi di mana pengendalian internal

tidak memadai, auditor perlu melakukan pengujian tambahan yang fokus pada identifikasi tanda-tanda kecurangan lainnya, seperti transaksi yang tidak sah, penyalahgunaan tanggung jawab, dan kerugian yang signifikan.

3) Keakuratan

Auditor harus mengumpulkan bukti yang tepat mengenai indikasi kecurangan yang mungkin terjadi, agar hasil laporan yang dihasilkan tidak keliru.

4) Kecermatan

Auditor perlu menentukan apakah hasil yang diperoleh memerlukan penyelidikan lebih lanjut atau tidak.

2.3 Kompetensi

2.3.1 Definisi Kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung sikap kerja serta penerapannya melaksanakan tugas dan pekerjaan yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan (Sutrisno, 2016). Menurut Armawan & Wiratmaja (2020) kompetensi auditor merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang auditor dalam menerapkan pengetahuan dan pengamalam yang telah diperoleh. Kompetensi ini memungkinkan auditor untuk melaksanakan proses audit secara lebih teliti, objektif, dan cermat. Aspek yang mempengaruhi kompetensi auditor yaitu pendidikan formal di bidang akuntansi yang diperoleh dari perguruan tinggi serta ujian profesi auditor, pelatihan praktis yang mendukung kemampuan teknis, dan pendidikan profesional yang terus menerus dijalani sepanjang karir sebagai auditor.

Kompetensi auditor tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mencakup sikap profesional, etika, dan kemampuan berpikir kritis yang mendukung pelaksanaan audit secara independen dan objektif. Kompetensi auditor memiliki peran krusial karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap tugas yang diemban. Auditor yang memiliki kompetensi tinggi cenderung melaksanakan pekerjaannya dengan integritas dan profesionalisme yang kuat, sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan atau *fraud* dapat dideteksi. Rasa tanggung jawab yang timbul dari kompetensi tersebut juga membantu menjaga kejujuran dan etika selama proses audit, sehingga pendeteksian *fraud* dapat dilakukan sejak tahap awal.

2.3.2 Indikator Kompetensi

Menurut Said & Munandar (2018) dan Marcia & Affandi (2024) ada beberapa indikator kompetensi auditor yaitu,

1) Mutu personal

   Seorang auditor harus memiliki kualitas pribadi yang baik saat melakukan pekerjaannya. Ini termasuk pikiran yang terbuka dan luas, kemampuan untuk menangani situasi yang tidak pasti, kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, rasa ingin tahu, kesiapan untuk menghadapi tugas yang kompleks, dan kesadaran bahwa beberapa hasil dapat bersifat subjektif.

2) Pengetahuan umum

   Auditor harus memahami standar yang berlaku dan analisis ulasan, serta memahami pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan atau pelatihan sebagai auditor.

3) Keahlian khusus

Auditor harus dapat membaca dan membuat statistik, menggunakan komputer dengan baik, dan menulis serta menyajikan laporan dengan baik.

4) Pengalaman auditor

Akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan praktis yang diperoleh oleh auditor dalam menjalankan tugas audit secara berkelanjutan dalam berbagai jenis industri, kompleksitas klien, serta berbagai jenis kejadian audit yang berbeda-beda, sehingga meningkatkan kemampuan para auditor dalam mengidentifikasi risiko, mengevaluasi bukti audit, dan mendeteksi indikasi *fraud* secara efektif.

2.4 Skeptisisme Profesional

2.4.1 Definisi Skeptisme Profesional

Skeptisisme profesional ialah sikap mental yang dimiliki auditor yang menekankan pentingnya analisis yang cermat dan evaluasi kritis atas bukti audit dalam situasi di mana terdapat kemungkinan salah saji karena kesalahan atau kecurangan (Hayes R & Gortemaker, 2017). Standar professional akuntan publik mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Dengan demikian, skeptisisme profesional merupakan sikap mental auditor yang kritis dan selalu mempertanyakan keandalan informasi serta bukti audit yang diperoleh selama proses pemeriksaan.

ISA 200 secara khusus menyatakan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksankan audit dengan skeptisisme profesional dengan mengakui bahwa

keadaan mungkin ada yang menyebabkan laporan keuangan disajikan secara material yang salah. Sikap skeptis yang dimiliki auditor memiliki kontribusi yang signifikan dalam meminimalkan risiko terjadinya *fraud*. Ketika auditor menerapkan skeptisisme profesional dengan konsisten, mereka akan terdorong untuk melakukan penggalian informasi yang lebih mendalam kepada pihak manajemen mengenai berbagai keputusan akuntansi yang telah ditetapkan, serta melakukan pencarian bukti audit yang komprehensif guna mendukung validitas keputusan akuntansi.

Penerapan skeptisisme profesional juga memiliki fungsi vital dalam upaya deteksi dan pencegahan tindak kecurangan. Peursem (2010) mengemukakan bahwa praktik audit pada dasarnya melibatkan aktivitas pencarian dan verifikasi keakuratan dari berbagai bukti audit berupa dokumentasi dan *working paper*, serta mengikuti prosedur standar yang berlaku. Namun demikian, tugas auditor tidak terbatas pada pemenuhan prosedur formal semata, terutama ketika menemukan bukti-bukti yang memiliki signifikansi tinggi. Dalam proses evaluasi bukti audit, auditor dituntut untuk mempertahankan level skeptisisme profesional yang seimbang, yaitu tidak berprasangka buruk bahwa manajemen pasti melakukan kecurangan, namun juga tidak mengasumsikan bahwa kejujuran manajemen bersifat mutlak (Arens et al., 2010).

2.4.2 Karakteristik Skeptisme Profesional

Hurtt et al. (2013) menjelaskan bahwa penerapan skeptisisme professional dipahami berdasarkan karakteristik sikap yang membentuknya, yaitu:

1) Karakteristik mengenai pengujian bukti audit

a) *Questioning mind* (pikiran yang mempertanyakan)

Sikap mental seorang auditor yang selalu ingin tahu dan tidak mudah percaya begitu saja terhadap informasi yang diberikan.

b) Suspension of judgement (penundaan keputusan)

Mengacu pada sikap auditor untuk menunda kesimpulan atau penilaian audit sampai bukti yang cukup dan relevan terkumpul.

c) Search for knowledge (pencarian pengetahuan)

Rasa keingintahuan dan kepetingan secara umum dan tidak memerlukan motivasi untuk mendapatkan informasi yang spesifik.

2) Karakteristik mengenai pemahaman bukti audit

a) *Interpersonal understanding* (pemahaman interpersonal)

Pada evaluasi bukti, auditor perlu memahami mengenai tujuan motivasi, dan integritas pihak yang memberikan bukti untuk memastikan apakah bukti audit yang diberikan sudah valid.

3) Karakteristik mengenai inisiatif untuk bersikap skeptis berdasarkan bukti audit yang diperoleh

a) *Self confidence* (percaya diri)

Keyakinan auditor terhadap kemampuannya untuk melaksanakan tugas audit dengan kompeten dan objektif, serta memberikan opini yang wajar berdasarkan bukti yang diperoleh.

b) *Self determination* (keteguhan diri)

Tingkat bukti yang diputuskan oleh auditor untuk hipotesis tertentu serta menyimpulkan bukti yang dikumpulkan secara objektif.

2.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.5.1 Definisi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuannya (Laudon & Laudon, 2021). Teknologi informasi adalah kombinasi teknologi komunikasi dan komputasi yang digunakan untuk menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, dan mengirim data. Ini memungkinkan informasi yang relevan, akurat, efisien, tepat waktu, dan dapat dipercaya untuk digunakan oleh pengguna untuk memecahkan masalah, mendorong kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Perkembangan teknologi informasi telah merasuki ke segala bidang dan lapisan masyarakat, dan dengan dukungannya membuat organisasi serta individu dalam dunia bisnis memiliki keunggulan kompetitif yang luar biasa khususnya dalam proses audit yang berbasis komputerisasi guna membantu meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan (Utomo, 2006). Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar pada berbagai elemen kehidupan. Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan auditor untuk mengakses dan menelaah data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat, sehingga teknologi informasi tidak hanya mempercepat proses audit tetapi juga meningkatkan kualitas dan keandalan hasil audit.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah ukuran untuk mengetahui sejauh mana suatu individu atau organisasi secara aktif dan optimal menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Thompson

et al. (1991) menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai *actual use* dari teknologi informasi oleh suatu individu dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya. Dalam definisi tersebut tampak jelas bahwa yang diukur bukanlah ketersediaan teknologi, melainkan perilaku aktual penggunaan teknologi dalam praktik kerja sehari-hari. Dalam *Technology Acceptance Model* (TAM) terdapat dua faktor utama yang mendorong seseorang memanfaatkan teknologi secara optimal yakni persepsi kemanfaatan *(perceived usefulness)* dan persepsi kemudahan penggunaan *(perceived ease of use)*. Persepsi kemanfaatan merujuk pada keyakinan individu bahwa penggunaan teknologi tertentu akan secara nyata meningkatkan kinerja dan hasil pekerjaannya. Sementara itu, persepsi kemudahan penggunaan merujuk pada keyakinan individu bahwa teknologi tersebut tidak memerlukan upaya berlebihan untuk dipelajari dan dioperasikan. Kedua faktor ini bekerja secara sinergis ketika pengguna meyakini bahwa teknologi bermanfaat sekaligus mudah digunakan, maka niatnya untuk memanfaatkan teknologi tersebut akan semakin kuat dan pada akhirnya terwujud dalam perilaku penggunaan yang nyata dan konsisten (Choirunnisa, 2022).

2.5.2 Dimensi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut (Laudon & Laudon, 2021) pemanfaatan teknologi informasi diukur melalui lima dimensi berikut ini,

1) *Hardware* mencakup komputer, laptop, server, jaringan, dan perangkat pendukung lainnya.
2) *Software* mencakup komponen aplikasi dan operasi.

3) Data mencakup fakta mentah yang diolah menjadi informasi yang berguna.
4) Prosedur mencakup kebijakan dan aturan untuk pengumpulan dan penggunaan data.
5) Sumber Daya Manusia (SDM) mencakup kapasitas dan kemampuan dari pihak yang terlibat dalam pemanfaatan teknologi informasi.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Peneliti Pendahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Obyek	Hasil Penelitian
1.	(Yunira et al., 2025)	**Independen:** X_1: Skeptisisme Profesional X_2: Pengalaman Auditor X_3: Kompetensi X_3: Independensi **Dependen:** Deteksi *Fraud*	Kantor Akuntan Publik DKI Jakarta	• Skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap deteksi *fraud*. • Pengalaman auditor berpengaruh negatif terhadap

				deteksi *fraud*. • Kompetensi berpengaruh negatif terhadap deteksi *fraud*. • Indepedensi berpengaruh positif terhadap deteksi *fraud*.
2.	(Afrizal et al., 2024)	**Independen:** X_1: Teknologi Informasi **Dependen:** Pendeteksian *Fraud* **Moderasi:** Pengalaman Auditor	KAP di Jawa Tengah	• Teknologi informasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pendeteksian *fraud*.

				• Pengalaman auditor tidak secara signifikan memoderasi pengaruh teknologi informasi terhadap pendeteksian *fraud*.
3.	(Daniswari et al., 2025)	**Independen:** X_1: Independensi X_2: Pengalaman Auditor X_3: Kompetensi **Dependen:** Kemampuan Auditor Mendeteksi *Fraud*	Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Selatan	• Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. • Pengalaman Auditor

				berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. • Kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
4.	(Budiantoro et al., 2022)	**Independen:** X_1: Beban Kerja X_2: Skeptisisme Profesional X_3: Pengalaman Auditor	KAP Jakarta Pusat	• Pengurangan beban kerja tidak berpengaruh dalam

		Dependen: Y: Mendeteksi Kecurangan **Moderasi:** Pelatihan Audit Kecurangan		mendeteksi kecurangan. • Skeptisisme profesional berpengaruh signifikan dalam mendeteksi kecurangan. • Pengalaman auditor berpengaruh signifikan dalam mendeteksi kecurangan. • Pelatihan audit mengurangi beban kerja dan meningkatkan

				kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. • Pelatihan audit tidak mengurangi skeptisisme profesional tentang kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan. • Pelatihan audit mengurangi pengalaman auditor dan secara signifikan

				mengurangi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
5.	(Suriani et al., 2023)	**Independen:** X_1: Skeptisisme Profesional X_2: Pengalaman Auditor X_3: Tekanan Waktu **Dependen:** Deteksi Kecurangan	Kantor Akuntan Publik Sulawesi Selatan	• Skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap deteksi kecurangan. • Pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap deteksi kecurangan. • Tekanan waktu berpengaruh

				negatif terhadap deteksi kecurangan.

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

Kompetensi merupakan kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang sangat penting dalam menjalankan tugas audit secara efektif dan akurat. Menurut Armawan & Wiratmaja (2020) kompetensi auditor merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang auditor dalam menerapkan pengetahuan dan pengamalam yang telah diperoleh. Auditor yang memiliki kompetensi tinggi mampu mengidentifikasi tanda-tanda kecurangan *(red flags)* dalam laporan keuangan dengan lebih cepat dan tepat, sehingga potensi *fraud* dapat dicegah atau diminimalkan. Kompetensi auditor juga berperan dalam membentuk sikap profesionalisme dan integritas yang tinggi, yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan audit secara independen dan objektif. Sikap profesional ini membuat auditor lebih bertanggung jawab dan cermat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga risiko terjadinya *fraud* akibat kelalaian atau kolusi dapat dikurangi.

Selain pengetahuan teknis, kompetensi auditor juga mencakup mutu personal dan keahlian khusus yang secara langsung menentukan seberapa tajam

kemampuannya dalam mengidentifikasi indikasi kecurangan (Choirunnisa, 2022). Tantangan *fraud* yang semakin kompleks dan beragam menuntut kompetensi auditor untuk terus diperbarui melalui pelatihan dan pendidikan profesional berkelanjutan, karena auditor yang tidak berkembang dalam pengetahuannya akan semakin tertinggal dari para pelaku kecurangan yang terus berinovasi dalam menyembunyikan jejaknya. Auditor yang benar-benar kompeten tidak hanya memahami standar audit secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keahliannya secara cermat dan terarah dalam setiap tahapan prosedur audit mulai dari perencanaan hingga penarikan kesimpulan. Sehingga, setiap indikasi kecurangan yang tersembunyi di balik laporan keuangan klien dapat diidentifikasi dan diungkap secara akurat sebelum berdampak lebih luas bagi pemangku kepentingan.

Beberapa temuan penelitian sebelumnya memperkuat argumen bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud.* Berdasarkan hasil peneliti pendahulu yakni Daniswari et al. (2025) memperoleh hasil kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Choirunnisa (2022) memperoleh hasil kompetensi berpengaruh positif terhadap pendeteksian *fraud.* Hasil penelitian oleh Rachmaputri & Nugrahanti (2025) memperoleh hasil kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan teori dan hasil peneliti pendahulu, maka hipotesis penelitian ini ialah:

H1: Kompetensi (X_1) berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* (Y).

2.7.2 Pengaruh Skeptisisme Profesional Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

Skeptisisme profesional adalah sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit (Hayes R & Gortemaker, 2017). Berdasarkan teori atribusi, sikap pribadi auditor merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja atau perilaku individu dalam menjalankan tugasnya. Kemampuan auditor dalam mengindentifikasi penipuan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung sikap skeptisisme professional, termasuk kondisi saat audit, nilai-nilai etika, serta tingkat keahlian dan pengalaman yang dimiliki auditor. Di era saat ini, dimana transaksi digital semakin kompleks dan volume data sangat besar, skeptisisme profesional menjadi lebih penting dari sebelumnya. Hal ini menyatakan bahwa auditor yang memiliki tingkat skeptisisme profesional tinggi akan lebih efektif dalam mendeteksi *fraud* karena mereka tidak mudah menerima informasi mentah dari klien, tetapi selalu mempertanyakan kewajaran dan kebenaran data yang ada (Yunira et al., 2025).

Situasi sekarang ini membawa tantangan baru dalam deteksi *fraud* karena modus kecurangan yang terus berkembang semakin sulit diidentifikasi melalui pendekatan audit konvensional semata. Pelaku *fraud* kini mampu menyembunyikan jejaknya dengan lebih rapi dan sistematis sehingga dibutuhkan sikap mental yang jauh lebih kritis dan waspada dari seorang auditor untuk dapat menembusnya. Ketika seorang auditor dibekali dengan pola pikir yang kritis, auidtor akan memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap bias kepercayaan berlebih pada kejujuran

manajemen, sehingga proses pengujian bukti menjadi lebih objektif dan transparan (Nolder & Kadous, 2018). Oleh karena itu, sinergi antara skeptisisme profesional dan ketegasan dalam mengevaluasi bukti audit menjadi faktor penentu utama bagi keberhasilan auditor dalam mendeteksi dan mengungkap kecurangan.

Beberapa temuan penelitian sebelumnya memperkuat argument bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud.* Berdasarkan hasil dari peneliti pendahulu yakni Yunira et al.(2025) diperoleh hasil skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap deteksi *fraud.* Penelitian yang dilakukan oleh Budiantoro et al. (2022) memperoleh hasil skeptisisme profesional berpengaruh signifikan dalam mendeteksi kecurangan. Suriani et al. (2023) juga memperoleh hasil skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap deteksi kecurangan. Berdasarkan teori dan hasil peneliti pendahulu, maka hipotesis penelitian ini ialah:

H2: Skeptisisme Profesional (X_2) berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* (Y).

2.7.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

Auditor tidak lagi bisa hanya mengandalkan kemampuan manual dalam menelusuri jejak kecurangan. Kompleksitas transaksi keuangan yang semakin tinggi menuntut auditor untuk memanfaatkan teknologi informasi secara optimal sebagai instrumen utama dalam proses audit. Dwi et al. (2021) menegaskan bahwa modus operandi kecurangan yang semakin terdigitalisasi tidak dapat diidentifikasi secara efektif dengan metode audit konvensional karena teknologi informasi

memainkan peran yang sangat penting dalam membantu auditor mengungkap kecurangan. Pemanfaatan teknologi informasi ialah konsep yang lebih spesifik dari sekadar kepemilikan teknologi, karena pemanfaatan teknologi informasi mengukur sejauh mana individu atau organisasi secara aktif dan optimal menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Thompson et al., 1991) Dalam konteks audit, pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu proses audit memungkinkan auditor untuk melakukan penilaian seratus persen populasi transaksi klien bukan hanya dalam bentuk sampling, sehingga kesalahan yang sengaja disembunyikan di antara ribuan transaksi dapat lebih teridentifikasi dengan lebih tepat dan lebih efisien. Adanya teknologi audit dalam bentuk *continuous auditing* dan *continuous monitoring* dapat memberikan hasil penilaian lebih cepat dan memungkinkan untuk menekan potensi manipulasi sebelum berdampak pada laporan keuangan, sehingga perusahaan yang telah menerapkan teknologi ini menunjukkan penurunan tingkat *fraud* secara signifikan karena setiap perubahan data langsung terdeteksi dan diverifikasi oleh sistem (Ancelin Feodora Anthony et al., 2023).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses audit bekerja melalui beberapa mekanisme yang memperkuat kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Salah satunya adalah dengan menggunakan program-program audit seperti ACL *(Audit Command Language),* IDEA *(Interactive Data Extraction and Analysis)* atau program audit lainnya. Auditor dapat menjalankan prosedur analitis yang lebih mendalam dan lebih komprehensif dibandingkan dengan proses audit manual seperti mendeteksi transaksi yang duplikat, mengidentifikasi transaksi

jurnal penyesuaian yang tidak biasa, serta menemukan pola pembayaran yang tidak normal dibandingkan dengan kebiasaan normal klien. Auditor yang memanfaatkan teknologi informasi secara optimal mampu menyelesaikan prosedur audit yang kompleks dalam waktu lebih singkat sehingga memiliki lebih banyak ruang untuk melakukan analisis mendalam pada area-area yang berisiko tinggi terhadap kecurangan (Choirunnisa, 2022). Pemanfaatan teknologi informasi akan membantu para auditor untuk mengakses serta memvalidasi data keuangan dari para klien secara mandiri atau tanpa harus bergantung sepenuhnya kepada informasi yang disampaikan oleh para manajemen perusahaan yang akan diperiksa. Dengan demikian, semakin optimal auditor memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap tahapan prosedur auditnya mulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, hingga evaluasi temuan, maka semakin luas jangkauan pengujiannya dan semakin tajam kemampuannya dalam mengidentifikasi indikasi kecurangan yang tersembunyi.

Berdasarkan hasil peneliti pendahulu yakni Afrizal et al. (2024), Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud* dan teori di atas. Maka hipotesis penelitian ini ialah:

H3: Pemanfaatan Teknologi Informasi(X_4) berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* (Y).